

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Objek Penelitian

#### 1. Kondisi Geografis Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus adalah salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang langsung berbatasan dengan empat Kabupaten yakni:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara

Letak Kabupaten Kudus ada di antara  $110^{\circ}36'$  dan  $110^{\circ}50'$  Bujur Timur dan antara  $6^{\circ}51'$  dan  $7^{\circ}16'$  Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Kudus diketahui sebesar 42.516 Ha atau sekitar 1,31% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Adapun jarak bentangan dari bagian utara ke selatan yaitu 22 km dan bagian barat ke timur adalah 16 km.

Secara administrasi, Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 Kecamatan, 9 Kelurahan, dan 123 Desa, 716 Rukun Warga (RW), dan 3.764 Rukun Tetangga (RT). Kesembilan kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Kota, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Jati, Kecamatan Undaan, Kecamatan Bae, dan Kecamatan Dawe.<sup>1</sup> Adapun rincian administrasi dari masing-masing kecamatan sebagaimana tabel di bawah ini:

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus Daring, "Letak Geografis Kabupaten Kudus," 2023, <https://kuduskab.bps.go.id/>.

**Tabel 4.1**  
**Pembagian Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan**  
**(Desa/Kelurahan, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga**  
**(RT), dan Dukuh) di Kabupaten Kudus Tahun 2022**

<b>Kecamatan</b>	<b>Luas Wilayah</b>	<b>Jumlah Kelurahan dan Desa</b>	<b>Dukuh</b>	<b>RW</b>	<b>RT</b>
Kota	1.047,31 Ha	9 Kelurahan dan 16 Desa	34	110	497
Jekulo	8.291,67 Ha	12 Desa	45	85	445
Gebog	5.506 Ha	11 Desa	38	82	435
Kaliwungu	3.271,28 Ha	15 Desa	48	67	442
Jati	2.629,80 Ha	14 Desa	52	79	386
Mejubo	3.676,57 Ha	11 Desa	33	69	341
Undaan	7.177,03 Ha	16 Desa	33	63	357
Bae	2.332,28 Ha	10 Desa	38	51	285
Dawe	8.584,00 Ha	18 Desa	71	110	583

**2. Jumlah Penduduk Kabupaten Kudus**

Berikut adalah tabel rincian jumlah penduduk pada 9 kecamatan di Kabupaten Kudus berdasarkan jenis kelamin tahun 2022:

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Kudus Tahun 2022**

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin</b>		
	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Total</b>
Kota	43.184	45.451	88.635
Jekulo	54.735	54.909	109.644
Gebog	52.756	52.693	105.449

Kaliwungu	52.660	52.159	104.819
Jati	54.592	55.090	109.682
Mejobo	39.313	38.956	78.269
Undaan	38.812	38.597	77.409
Bae	37.304	37.448	74.752
Dawe	53.887	53.926	107.813

Sumber: Diolah Peneliti Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, 2023

### 3. Kondisi Stunting di Kabupaten Kudus

Stunting adalah permasalahan pokok dalam bidang kesehatan di berbagai daerah, tak terkecuali di Kabupaten Kudus. Stunting adalah keadaan terhambatnya pertumbuhan pada anak yang disebabkan oleh pemberian asupan nutrisi yang kurang sehingga pertumbuhan anak menjadi terhambat. Dampak dari kekurangan gizi yang terjadi pada anak menyebabkan gagal tumbuh yang akan berakibat pada kehidupan di masa depan sehingga susah untuk dibenahi, seperti kemampuan dalam belajar anak yang rendah, menurunnya kinerja otak dan kemampuan kognitifnya, serta penyakit yang mudah menyerang tubuh anak.

**Gambar 4.1**

**Tingkat Prevalensi Stunting di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2022**



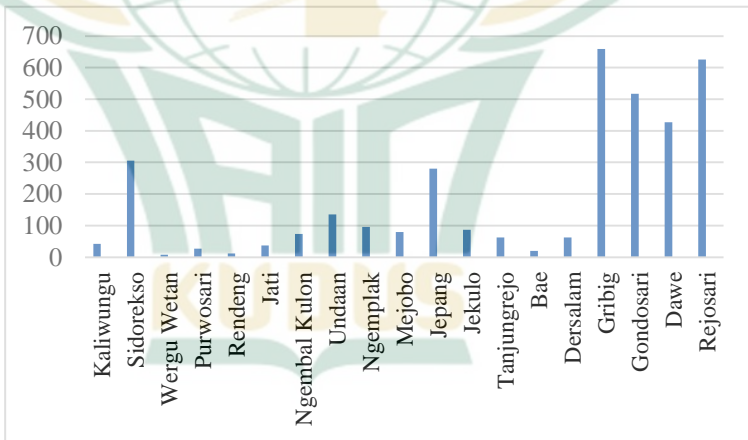
Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, bahwa kasus stunting di Kabupaten Kudus selama 2022 naik menjadi 6,6% dari yang sebelumnya 4,5% pada tahun 2021. Stunting yang terjadi di Kabupaten Kudus disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor penyebab utama stunting di Kabupaten Kudus yaitu dikarenakan pemenuhan gizi pada anak yang kurang maksimal, sehingga mengakibatkan pertumbuhan seorang anak terhambat.

Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus telah menyadari adanya permasalahan ini serta menentukan langkah-langkah dalam menanggulangnya. Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah melalui edukasi dan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) yang harapannya dapat memberikan pemahaman kepada orang tua dalam membantu menanggulangi masalah stunting.

**Gambar 4.2**

**Presentase Balita Stunting dari Puskesmas se-Kabupaten Kudus**



Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Puskesmas Rejosari mencatatkan presentase stunting tertinggi (23,2%) di Kabupaten Kudus pada 2022, disebabkan oleh pola asuh, pekerjaan ibu, faktor genetik, pendapatan keluarga, pendidikan ibu, pemahaman ibu tentang gizi, dan usia pemberian MP-ASI. Puskesmas Gribig juga mencatat tingkat stunting sebesar 17,8%, dengan faktor penyebab melibatkan

makanan, pendidikan, pola asuh, sosial ekonomi, dan pernikahan dini.

Kesimpulannya, stunting di Kabupaten Kudus merupakan permasalahan serius yang kompleks dengan faktor penyebab seperti kurangnya pemenuhan gizi, pola asuh, sosial ekonomi, pernikahan dini, dan kurangnya pemahaman orang tua. Upaya seperti edukasi dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) merupakan suatu langkah positif dalam menanggulangi masalah ini. Dampak dari adanya masalah stunting tersebut bukan hanya pada faktor kesehatan pada anak, tetapi juga berpengaruh bagi perekonomian suatu daerah.

**B. Deskripsi Data Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti mengambil 9 informan terkait judul penelitian yang diambil oleh peneliti.

**Tabel 4.3**  
**Informan Penelitian**

No	Nama	Status Informan
1.	Nuryanto, S.KM., MM	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus
2.	Sri Heny Wahyuningsih, S.KM	Nutrisionis Puskesmas Rejosari
3.	Noviani Dewi Maharani, S.Gz	Nutrisionis Puskesmas Gribig
4.	Putri Wulan Muta'aliyah, Amd.Keb	Bidan Desa Rejosari
5.	Ulya Mabruroh, Amd.Keb	Bidan Desa Gribig
6.	Agung Triyatno	Sekretaris Desa Rejosari
7.	Sunarsih	Kepala Dusun Desa Gribig
8.	Ni'matun Khasanah	Ibu balita stunting Desa Rejosari
9.	Selly	Ibu balita stunting Desa Gribig

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan pengkajian dokumen yang dilaksanakan oleh peneliti di Kabupaten Kudus, ditemukan data mengenai Implementasi Kebijakan dalam Penanggulangan Stunting di Kabupaten Kudus. Dalam Penyusunan data penelitian dilakukan kategorisasi data sesuai dengan rumusan masalah yang akan dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Implementasi Kebijakan SDGs dalam Penanggulangan Stunting di Kabupaten Kudus**

George Edwards III memiliki dasar dalam menaksir kesuksesan implementasi kebijakan, sebagaimana yang terdapat dalam teorinya bernama Teori Implementasi Kebijakan George Edwards III. Terdapat empat variabel yang bisa berdampak terhadap kesuksesan sebuah implementasi kebijakan. Keempat variabel itu antara lain yakni *communication* (komunikasi), *resources* (sumber daya), *disposition* (sikap), dan *bureaucratic structure* (struktur birokrasi).<sup>2</sup>

Kemudian dengan keempat variabel tersebut peneliti menggunakannya dalam menganalisis kesuksesan implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Kudus. Implementasi kebijakan dalam penanggulangan stunting perspektif George Edwards III bisa dilihat dari beberapa instansi sebab stunting menjadi sebuah masalah yang perlu diatasi oleh semua jajaran Pemerintah di Kabupaten Kudus. Berikut peneliti menjelaskan kesuksesan implementasi kebijakan dari beberapa instansi, yaitu:

#### **a. Komunikasi**

Komunikasi adalah salah satu hal yang membuktikan kesuksesan sebuah implementasi kebijakan yang dilakukan.<sup>3</sup> Komunikasi dalam penelitian ini dinilai dari transmisi, kejelasan dan konsistensi.

#### **1. Transmisi**

Berdasarkan wawancara yang sudah dilaksanakan oleh peneliti dengan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, dapat disimpulkan bahwa pengkomunikasian implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Dinas Kesehatan

---

<sup>2</sup> Jumroh and Pratama, *Implementasi Pelayanan Publik: Teori Dan Praktik*, 122.

<sup>3</sup> Sri Kemala Sandi Yuanita, Yaswinda, and Mega Adyna Movitaria, "Evaluasi Model CIPP Program Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Untuk Meningkatkan Kompetensi Pendidik Anak Usia Dini Di Kota Payakumbuh," *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2022): 3436, [www.aging-us.com](http://www.aging-us.com).

Kabupaten Kudus didasarkan pada dasar hukum yang kuat, termasuk Perpres, Pergub, dan Perbup. Dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut, telah dibentuk tim audit stunting dan tim percepatan penanggulangan stunting dengan dasar Surat Keputusan (SK). Intervensi spesifik dilakukan melalui kegiatan teknis yang melibatkan Dinas Kesehatan, Puskesmas, fasilitas kesehatan, dan rumah sakit, dengan kontribusi sebesar 30%. Selain itu, terdapat juga intervensi sensitif yang melibatkan sektor di luar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Intervensi ini mengakomodasi penyebab dan kasus-kasus yang berkaitan dengan stunting. Pentingnya sinergi lintas sektoral terlihat dari upaya untuk melibatkan berbagai pihak. Secara keseluruhan, kesimpulan dari wawancara tersebut yakni harus ada kolaborasi lintas sektoral agar secara efektif dapat menurunkan angka stunting di Kabupaten Kudus.<sup>4</sup>

Selain wawancara dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, peneliti juga melaksanakan wawancara dengan Nutrisisionis Puskesmas Rejosari:

“Pertemuan Lintas Program Lintas Sektoral, SMD, MMD, Kelas Balita, Kelas Bumil, Kunjungan KN, Kunjungan KF, Kunjungan bumil resti, Pelacakan Bumil KEK, Pelacakan Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang, PMT Lokal bumil KEK dan Balita gizi kurang, Kelas Si Cerdas, *refreshing* kader dan masih banyak kegiatan lainnya”.

Dari keterangan di atas, menunjukkan bahwa beragam kegiatan dilakukan oleh Puskesmas Rejosari guna mengkomunikasikan pengimplementasian kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting melalui pertemuan lintas program dan lintas sektoral, SMD, MMD, Kelas Balita, Kelas Bumil, Kunjungan KN, Kunjungan KF, Kunjungan bumil resti, Pelacakan Bumil KEK, Pelacakan Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang, PMT Lokal bumil

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Nuryanto, S.KM., MM selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Pada tanggal 13 Desember 2023, transkrip.

KEK dan Balita gizi kurang, Kelas Si Cerdas, *refreshing* kader, dan kegiatan lainnya.<sup>5</sup>

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Nutrisionis Puskesmas Gribig “Komunikasi implementasi kebijakan penanggulangan stunting di wilayah kerja Puskesmas gribig melalui kegiatan kegiatan rembug stunting tingkat desa, rembug stunting tingkat kecamatan, lokakarya mini lintas sektor, dan musyawarah masyarakat desa”.

Kesimpulan dari wawancara tersebut adalah bahwa Puskesmas Gribig telah mengimplementasikan kebijakan penanggulangan stunting dengan pendekatan komunikatif yang melibatkan partisipasi masyarakat dan koordinasi lintas sektor. Langkah-langkah tersebut mencerminkan kesadaran akan pentingnya kolaborasi antar *stakeholder* dalam menanggulangi stunting.<sup>6</sup>

Di sisi lain, peneliti melakukan wawancara kepada Bidan Desa Rejosari yang mengatakan bahwa:

“Pertama ya penyuluhan atau sosialisasi. Kita cari solusi sama-sama tapi kan ya itu lagi kembali ke orang tuanya karena kalau kerja pabrik dari pagi sampai sore yakan, kita kan tidak mungkin melarang orang tuanya bekerja. Jadi ya sebisa mungkin kita cari solusi sama-sama, bagaimana kalau sebelum berangkat kerja itu kita menyiapkan makanan tambahan untuk balitanya. Yang paling utama itu ya memang penyuluhan, sosialisasi ada juga dengan pemberian PMT gizi lengkap. Terus untuk medianya apa itu kita juga ada grup WA untuk mengkomunikasikan tadi”.

Pada wawancara tersebut bisa diketahui pengkomunikasian yang dilakukan yakni dengan upaya penyuluhan atau sosialisasi dan grup WA dengan mencari solusi bersama meskipun terkendala dengan kesibukan orang tua anak. Pada intinya, sosialisasi tersebut merupakan upaya konkret untuk menanggulangi stunting

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Sri Heny Wahyuningsih, S.KM selaku Nutrisionis Puskesmas Rejosari, Pada tanggal 23 Desember 2023, transkrip.

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Noviani Dewi Maharani, S.Gz selaku Nutrisionis Puskesmas Gribig, Pada tanggal 22 Desember 2023, transkrip.



dalam mendukung kesehatan balita di tengah keterbatasan waktu orang tua yang bekerja.<sup>7</sup> Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Bidan Desa Gribig bahwa melalui penyuluhan merupakan bentuk atau cara yang dilakukan untuk mengkomunikasikan pengimplementasian kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting.<sup>8</sup>

Masih dengan pertanyaan yang sama, jawaban yang sama dikatakan oleh Sekretaris Desa Rejosari dan Kepala Dusun Desa Gribig. Kepala Dusun Desa Gribig dalam wawancara berikut ini mengatakan bahwa:

“Dari Pemdes cara penanggulangannya dalam menghadapi masalah stunting ini mengkomunikasikan kepada warga kan kita ada posyandu. Setiap bulan kita ada posyandu, jadi kita itu berdasarkan temuan yang ada di posyandu, setiap bulan kan ada penimbangan terus tinggi badan itu pasti ada. Terus penanganan gizi buruk itu ada disitu semua. Jadi anak-anak yang tiap bulan ditimbang itu BB-nya tidak mau naik terus menurun, terus ada yang susah makan itu pasti kita dampingi untuk pemberian PMT-nya, kita konsultasikan kepada Puskesmas lewat Bidan Desa agar diberikan nutrisi tambahan dari Puskesmas”.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Rejosari dan Kepala Dusun Desa Gribig, dapat disimpulkan bahwa dalam mengkomunikasikan kebijakan penanggulangan stunting kepada masyarakat dilakukan melalui posyandu. Posyandu menjadi saluran dalam pemantauan kesehatan balita di Desa tersebut, dengan penimbangan dan pencatatan data yang dilakukan setiap bulan tersebut bisa mengetahui perkembangan anak.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Putri Wulan Muta'aliyah, Amd.Keb selaku Bidan Desa Rejosari, Pada tanggal 08 Desember 2023, transkrip.

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Ulya Mabruroh, Amd.Keb selaku Bidan Desa Gribig, Pada tanggal 18 Desember 2023, transkrip.

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Sunarsih selaku Kepala Dusun Desa Gribig, Pada tanggal 6 Desember 2023, transkrip.

Peneliti juga melaksanakan wawancara dengan ibu Selly dan Ni'matul selaku ibu balita stunting guna mengetahui adanya komunikasi implementasi kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting. Ibu Ni'matul menuturkan "Saya tau stunting dari posyandu dan sosialisasi yang diadakan di Balai Desa mbak. Saat sosialisasi dikasih tau berbagai makanan yang banyak nutrisinya untuk anak".

Hal tersebut dapat diketahui bahwa ibu balita stunting memperoleh informasi terkait implementasi kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting melalui posyandu dan sosialisasi yang diadakan oleh Desa.<sup>10</sup>

## 2. Kejelasan

Terkait kejelasan komunikasi pengimplementasian kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Kudus, seperti yang telah dikatakan oleh Nuryanto, S.KM, MM selaku Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus melakukan langkah-langkah seperti upaya untuk aksi bergizi yang melibatkan anak-anak SMP, MTS, kemudian SMA, MA. Kemudian dengan memberikan edukasi atau sosialisasi kepada calon pengantin, ibu hamil serta menyediakan fasilitas kesehatan yang mendukung.<sup>11</sup>

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Sri Heny Wahyuningsih, SKM selaku Nutrisionis Puskesmas Rejosari yang mengemukakan bahwa:

"Pemantauan antropometri kasus gizi kurang dan gizi buruk oleh kader, monitoring dan evaluasi dalam pemberian makanan tambahan dan perujukan ke dokter spesialis anak. Kegiatan sudah berjalan rutin setiap tahun dan untuk perujukan ke RSUD mulai bulan Juni 2023".<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Ni'matul Khasanah selaku Ibu balita stunting, Pada tanggal 19 Desember 2023, transkrip.

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Nuryanto, S.KM., MM selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Pada tanggal 13 Desember 2023, transkrip.

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Sri Heny Wahyuningsih, S.KM selaku Nutrisionis Puskesmas Rejosari, Pada tanggal 23 Desember 2023, transkrip.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Nutrisionis Puskesmas Gribig, mengatakan bahwa:

“Upaya yang dilakukan melaksanakan kegiatan intervensi spesifik dan sensitif dengan cara bekerjasama lintas program dan lintas sektor. Kegiatan tersebut terlaksana di tahun 2023 ini sesuai dengan perencanaan waktu, metode, sasaran dan tempat serta biaya“.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan kejelasan dalam implementasi kebijakan SDGs dalam menanggulangi stunting dilakukan dengan melaksanakan intervensi spesifik dan sensitif melalui kerjasama lintas sektor.<sup>13</sup>

Selain itu, wawancara peneliti dengan Ibu Sunarsih dan Bapak Agung Triyatno mempunyai kesamaan hasil bahwa upaya guna memastikan pengkomunikasian implementasi kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting yakni dengan melaksanakan kegiatan rutin Posyandu setiap bulan untuk mengetahui perkembangan balita stunting.<sup>14</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu stunting “Menurut saya ya jelas mbak. Sebagai ibu, saya juga rutin mendapatkan informasi dari posyandu, terus ada pemberian makanan bergizi untuk anak stunting, penyuluhan yang diadakan juga saya pernah ikut”.<sup>15</sup>

### 3. Konsistensi

Konsistensi komunikasi dalam rangka implementasi kebijakan sangat penting, guna menjaga persepsi, arah implementasi lebih termantapkan, dan mempertahankan sikap implementator terhadap kebijakan, sehingga sampai pada tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan wawancara dengan Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, mengemukakan bahwa:

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Noviani Dewi Maharani, S.Gz selaku Nutrisionis Puskesmas Gribig, Pada tanggal 22 Desember 2023, transkrip.

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Agung Triyatno selaku Sekretaris Desa Rejosari, Pada tanggal 5 Desember 2023, transkrip.

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Ni'matul Khasanah selaku Ibu balita stunting, Pada tanggal 19 Desember 2023, transkrip.

“Kebijakan tersebut tetap kita berupaya adanya intervensi spesifik itu yang menjadi tugas dari Dinas Kesehatan ya, kemudian ada intervensi sensitif itu kita kuatkan, kita melakukan evaluasi dan kita perbaiki sistem yang ada jika ada kekurangan. Kemudian untuk anggaran juga minta tambahan dari pemerintah daerah untuk menambah jika ada kasus-kasus yang memang mesti diintervensi”.

Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk menjaga keberlanjutan implementasi kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting, Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus tetap berupaya dalam intervensi spesifik dan intervensi sensitif untuk lebih dikuatkan, melakukan evaluasi, dan memperbaiki kekurangan yang ada.<sup>16</sup>

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan Nutrisisionis Puskesmas Gribig mengatakan bahwa:

“Semua kegiatan Rembug stunting Tingkat desa, Rembug stunting tingkat kecamatan, Lokakarya Mini Lintas Sektor, dan Musyawarah Masyarakat Desa sudah masuk dalam perencanaan usulan kegiatan di tahun 2024. sehingga kegiatan tersebut nantinya juga akan dilaksanakan di tahun 2024”.<sup>17</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Sri Heny Wahyuningsih, SKM selaku Nutrisisionis Puskesmas Rejosari yang mengatakan bahwa untuk menjaga keberlanjutan implementasi kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting adalah dengan saling bekerjasama dan berupaya membuat resep yang sesuai dengan selera sasaran dan kandungan gizi yang dianjurkan sehingga menarik serta menimbulkan selera makan untuk sasaran.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Nuryanto, S.KM., MM selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Pada tanggal 13 Desember 2023, transkrip.

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Noviani Dewi Maharani, S.Gz selaku Nutrisisionis Puskesmas Gribig, Pada tanggal 22 Desember 2023, transkrip.

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Sri Heny Wahyuningsih, S.KM selaku Nutrisisionis Puskesmas Rejosari, Pada tanggal 23 Desember 2023, transkrip.

Ibu Sunarsih selaku Kepala Dusun Desa Gribig menuturkan bahwa:

“Kami fokus pada kader-kader kesehatan masyarakat di tingkat desa. Kader-kader ini kan yang melakukan pemantauan kesehatan balita seperti kalau di Posyandu. Mereka tidak hanya menjadi sumber informasi yang dapat diandalkan bagi warga desa tetapi juga menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat”.

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa guna menjaga konsistensi pengkomunikasian implementasi kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting adalah fokus dengan kader-kader kesehatan yang ada di masyarakat yang melakukan pemantauan kesehatan balita di Posyandu.<sup>19</sup> Selain itu, berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Rejosari guna menjaga keberlanjutan pengkomunikasian implementasi SDGs dalam penanggulangan stunting dilakukan dengan meningkatkan Posyandu dan pemberian PMT (Pemberian Makanan Tambahan).<sup>20</sup>

## **b. Sumber Daya**

Pada penelitian ini, sumber daya mencakup jumlah dan kualitas staf, informasi yang tepat dan relevan, wewenang, dan fasilitas.

### **1. Jumlah dan kualitas staf**

Menurut Nuryanto terkait jumlah dan kualitas staf yang dimiliki Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Kudus sebagaimana pernyataan beliau bahwa:

“Iya, kita selalu memberikan pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas untuk nakesnya dari mulai dokternya, perawatnya, kemudian bidan, koordinator yang ada di Puskesmas, kemudian dengan Bidan Desa, kemudian tenaga gizi ya. Itu kita lakukan pendidikan ataupun edukasi peningkatan kapasitasnya tentang pengetahuan

---

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Sunarsih selaku Kepala Dusun Desa Gribig, Pada tanggal 6 Desember 2023, transkrip.

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Agung Triyatno selaku Sekretaris Desa Rejosari, Pada tanggal 5 Desember 2023, transkrip.

stunting yang ada di Kabupaten Kudus secara berurutan, berjenjang, bergantian seperti itu. Dan kita pun melakukan *refreshing* juga, selain nakesnya kita juga melibatkan kader itu penting karena kadang yang menjadi pertanyaan masyarakat kan larinya ke kader. Kader juga kita lakukan peningkatan kapasitas kader dengan pelatihan-pelatihan, dengan sosialisasi, dengan edukasi yang ada tiga bulan sekali, itu kita laksanakan seperti itu”.

Jumlah dan kualitas staf dalam pengimplementasian kebijakan SDGs terkait penanggulangan stunting seperti yang disampaikan Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus yaitu sudah memadai dan sesuai dengan bidangnya. Selain itu juga selalu memberikan pelatihan-pelatihan, pendidikan atau edukasi kepada tenaga kesehatan dan kader tentang pengetahuan stunting yang ada di Kabupaten Kudus.<sup>21</sup>

Kemudian hasil wawancara kepada informan selaku Nutrisionis Puskesmas Gribig:

“Sudah memadai karena Tim Asuhan Gizi terdiri dari Dokter, Ahli Gizi, Bidan, petugas program kesehatan reproduksi remaja, petugas promosi kesehatan, petugas penyehatan lingkungan, dan memberikan penata laksanaan stunting sesuai dengan bidangnya. Kualitas staf penanganan stunting, Tim Asuhan Gizi sudah terlatih (mempunyai sertifikat pelatihan konselor ASI, konselor PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak), *Trainer* Pelatihan terpadu *Management* Balita sakit dan Gizi Buruk“

Kesimpulannya, dalam mengimplementasikan kebijakan SDGs dalam menanggulangi stunting di Puskesmas Gribig dilengkapi dengan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan sertifikasi dalam mendukung pelaksanaan tugas, utamanya mengenai

---

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Nuryanto, S.KM., MM selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Pada tanggal 13 Desember 2023, transkrip.

pencegahan stunting.<sup>22</sup> Hal tersebut memiliki kesamaan dengan yang dikemukakan oleh Nutrisisionis Puskesmas Rejosari, yaitu untuk mengimplementasikan kebijakan SDGs guna menanggulangi stunting, Puskesmas Rejosari membentuk tim dalam melakukan tugas penanggulangan stunting. Tim tersebut terdiri dari satu bidan yang ahli memasak dan dua ahli gizi yang langsung berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas sebagai pimpinan.<sup>23</sup>

Wawancara dengan Sekretaris Desa Rejosari menyebutkan bahwa terkait kualitas dan jumlah staf terkait implementasi kebijakan dalam penanggulangan stunting sudah memadai dan mempunyai beberapa seksi.<sup>24</sup>

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Dusun Desa Gribig terkait jumlah dan kualitas staf dalam mengimplementasikan kebijakan SDGs untuk penanggulangan stunting:

“Kalau staf khusus untuk penanggulangan stunting itu ada grup khusus penurunan stunting ada saya, Pak Babinsa, Pak Bhabinkamtib, Bidan Desa, ibu-ibu kader, Pak Ingg, dan Pak Carik ada disini. Grup ini yang mengawal dan berusaha membantu jangan sampai ada ibu hamil yang beresiko tidak tertangani, yang dikhawatirkan stunting itu tadi mbak. Itu bukan staf tapi lebih ke pemangku kebijakan”.

Dalam wawancara tersebut dapat diketahui bahwa adanya kelompok khusus yang dibentuk oleh Desa untuk memperlihatkan adanya upaya sinergis dan keterlibatan *stakeholder* dalam menanggulangi stunting.<sup>25</sup>

## 2. Informasi yang tepat dan relevan

Informasi yang dimaksud disini adalah informasi dalam bentuk data yang berhubungan dengan pelaksanaan

---

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Noviani Dewi Maharani, S.Gz selaku Nutrisisionis Puskesmas Gribig, Pada tanggal 22 Desember 2023, transkrip.

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Sri Heny Wahyuningsih, S.KM selaku Nutrisisionis Puskesmas Rejosari, Pada tanggal 23 Desember 2023, transkrip.

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Agung Triyatno selaku Sekretaris Desa Rejosari, Pada tanggal 5 Desember 2023, transkrip.

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Sunarsih selaku Kepala Dusun Desa Gribig, Pada tanggal 6 Desember 2023, transkrip.

kebijakan. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti dengan Nuryanto selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus guna memperoleh informasi terkait implementasi kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Kudus yakni:

“Karena ini kan masanya masa daring ya, kita membuat WA group tentang penanganan stunting itu, kemudian di media sosial kita buat kan kemudian nanti masyarakat mengakses karena masyarakat kita sekarang semua kan yang generasi-generasi milenial atau generasi diatasnya sedikit itu kan mempunyai HP semua, mempunyai android semua itu kan komunikasi kita informasi kita bisa disampaikan kepada kader, kepada masyarakat luas dan aksesnya lebih mudah”.<sup>26</sup>

Selain itu, peneliti melakukan wawancara dengan Bidan Desa Gribig yang mengatakan bahwa:

“Pengumpulan data yang dari Posyandu ini, terus selain dari Posyandu biasanya kita punya jejaring itu ada dokter, dokter di wilayah kita, terus ada PMD, ada klinik, ada Rumah sakit. Jadi kalau ada data berkenaan dengan balita stunting nanti datanya dilaporkan ke kita, ke Puskesmas, Bidan Desa nanti dilaporkan ke Dinas Kesehatan”.

Hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kerjasama antar lembaga kesehatan dan memastikan bahwa informasi mengenai stunting dilaporkan dengan efektif dalam mendukung implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Kudus.<sup>27</sup> Hal tersebut mempunyai kesamaan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Putri, Bapak Agung, dan Ibu Sunarsih. Ibu Putri mengatakan bahwa:

---

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Nuryanto, S.KM., MM selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Pada tanggal 13 Desember 2023, transkrip.

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Ulya Mabruroh, Amd.Keb selaku Bidan Desa Gribig, Pada tanggal 18 Desember 2023, transkrip.



“Informasi ya penimbangan tiap bulan. Jadi si anak itu memang harus dipantau rutin setiap bulan berat badan dan tinggi badannya itu. Semakin rajin dia ke Posyandu, nanti semakin apa namanya kita semakin mudah menemukan stuntingnya, nanti kita mudah untuk mengatasinya. Kalau dia udah dititipkan, ngga pernah ke Posyandu itu susah. Jadi infonya yang dibutuhkan ya itu, untuk masyarakat mau datang rutin ke Posyandu”.<sup>28</sup>

### 3. Wewenang

Dalam hal ini, wewenang yang dimaksud adalah wewenang yang dimiliki oleh implementator guna mengimplementasikan kebijakan. Peneliti melakukan wawancara dengan Nuryanto selaku Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus yang mengatakan bahwa:

“Mungkin wewenang kita melakukan advokasi ya dengan lintas sektoral yang ada, dengan yang lebih tinggi mungkin kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu pendanaan ya, minta tambahan anggaran untuk menurunkan stunting. Jadi, intervensinya itu ada anggaran seperti pengadaan makanan tambahan, susu, seperti itu”.

Wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa wewenang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus adalah melakukan advokasi dengan lintas sektoral. Upaya tersebut melibatkan kegiatan pendanaan, termasuk pengadaan makanan tambahan, susu, dan lainnya guna menanggulangi stunting.<sup>29</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Nutrisisionis Puskesmas Gribig, yaitu “Melaksanakan

---

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Putri Wulan Muta’aliyah, Amd.Keb selaku Bidan Desa Rejosari, Pada tanggal 08 Desember 2023, transkrip.

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Nuryanto, S.KM., MM selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Pada tanggal 13 Desember 2023, transkrip.

kegiatan pencegahan dan penanganan stunting sesuai dengan bidangnya yaitu bidang kesehatan”.

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa wewenang dari Puskesmas Gribig adalah melaksanakan kegiatan penanggulangan stunting sesuai dengan bidangnya, yakni bidang kesehatan.<sup>30</sup> Hal tersebut memiliki kesamaan dengan yang dikatakan oleh Nutrisisionis Puskesmas Rejosari bahwa “Berupaya dalam pencegahan dan penanggulangan kasus stunting di wilayah kerja Puskesmas”.<sup>31</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dusun Desa Gribig mengatakan bahwa:

“Kita siapkan dana, anggaran tadi. Untuk PMT nya kita siapkan anggaran terus kita siapkan bantuan akomodasi. Apabila mau melahirkan tidak ada kendaraan itu untuk dibantu ke Puskesmas atau Rumah Sakit kita ada ambulans. Intinya kita permudahlah mbak”.<sup>32</sup>

Hal lain diungkapkan oleh Bapak Agung bahwa wewenang terkait implementasi kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting adalah ketika mendapatkan informasi dari pihak terkait seperti Bidan Desa atau Posyandu, melakukan upaya seperti memberikan PMT ke anak stunting atau vitamin dan melakukan pemantauan setiap bulannya di Posyandu”.<sup>33</sup>

#### 4. Fasilitas

Dalam hal ini, fasilitas yang memadai baik anggaran maupun fasilitas kerja sangat mendukung untuk pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nuryanto, S.KM, MM yakni:

“Fasilitas yang diberikan, yang pertama inikan di Posyandu banyak sekali. Posyandu itu kita fasilitasi dengan alat timbang yang sama, yang

---

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Noviani Dewi Maharani, S.Gz selaku Nutrisisionis Puskesmas Gribig, Pada tanggal 22 Desember 2023, transkrip.

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Sri Heny Wahyuningsih, S.KM selaku Nutrisisionis Puskesmas Rejosari, Pada tanggal 23 Desember 2023, transkrip.

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Sunarsih selaku Kepala Dusun Desa Gribig, Pada tanggal 6 Desember 2023, transkrip.

<sup>33</sup> Hasil Wawancara dengan Agung Triyatno selaku Sekretaris Desa Rejosari, Pada tanggal 5 Desember 2023, transkrip.

standar secara nasional yang namanya antropometri itu juga ada diseluruh Posyandu yang ada di Kabupaten Kudus, jadi alatnya sama. Yang kedua, ini juga ada pemberian PMT untuk anak-anak yang memang kasusnya stunting. Kemudian memang kita stunting ya mungkin saat penimbangan tidak ada kenaikan tinggi badan, tidak ada kenaikan itu kita rujuk juga ke Rumah Sakit akan mendapat intervensi yang khusus ya. Jadi mungkin PMT nya itu ada, makanan tambahannya itu ada khusus juga, disamping itu juga PMT lokal. PMT lokal itu diberikan kepada ibu hamil, kepada bayi atau anak stunting juga. Jadi yang melaksanakan PMT lokal itu kader-kader desa yang membuat makanan itu untuk diberikan kepada keluarga atau anak stuntingnya itu”.

Hal tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus untuk mengimplementasikan kebijakan penanggulangan stunting yaitu dengan memfasilitasi Posyandu yang ada di Kabupaten Kudus dengan alat timbang yang sama. Selanjutnya ada juga pemberian PMT (Pemberian Makanan Tambahan) khusus diberikan kepada anak-anak stunting dan apabila tidak ada peningkatan tinggi badan, anak dirujuk ke Rumah Sakit untuk memperoleh penanganan khusus. Selain itu, terdapat juga PMT lokal yang diberikan kepada ibu hamil dan kepada bayi atau anak stunting serta yang melaksanakan PMT lokal tersebut ialah kader-kader Desa.<sup>34</sup>

Berdasarkan pertanyaan yang sama yang diajukan peneliti kepada Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Nutrisionis Puskesmas Rejosari, Nutrisionis Puskesmas Gribig, Bidan Desa Gribig, Bidan Desa Rejosari, Kepala Dusun Desa Gribig dan Sekretaris Desa Rejosari mengungkapkan bahwa fasilitas atau anggaran guna mengimplementasikan kebijakan SDGs

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Nuryanto, S.KM., MM selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Pada tanggal 13 Desember 2023, transkrip.

dalam penanggulangan stunting terbilang cukup dan sudah memadai.<sup>35</sup>

Peneliti juga wawancara dengan Ibu balita stunting guna memastikan hal tersebut “Ya sebagai orang tua ya merasa sangat terbantu dengan fasilitas yang diberikan. Kami dapat PMT, terus penyuluhan itu kan saya jadi lebih tau makanan apa aja agar anak tidak stunting”.<sup>36</sup>

### c. Disposisi

Maksud disposisi disini yaitu tentang perilaku dan sikap dari pelaksana, walaupun komunikasi sudah terwujud dengan baik dan didukung oleh sumber daya yang optimal, tapi jika sikap para pelaksana yang tidak mendukung maka pengimplementasian kebijakan tidak akan berhasil. Dalam hal ini, disposisi mencakup:

#### 1. Sikap ego sektoral

Menurut Nuryanto, para *stakeholder* dalam menjalankan tugas penanggulangan stunting di Kabupaten Kudus sebagaimana pemaparan beliau yang mengatakan bahwa:

“Masalah saya kira tidak ada, karena itu sudah jelas ada di Perbasnya Nomor 72 Tahun 2021 dan memang ini adalah masalah bersama dalam bagaimana bisa menurunkan angka stunting ya, yang mana tujuan utama adalah menciptakan generasi yang hebat, generasi yang cerdas, generasi yang luar biasa di tahun 2045, itu adalah misi kita bagaimana di Kudus ini bisa menurunkan angka stunting”.

Dari pernyataan tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa tidak adanya masalah ego sektoral guna mengimplementasikan kebijakan, karena hal tersebut

---

<sup>35</sup> Hasil Wawancara dengan Agung Triyatno selaku Sekretaris Desa Rejosari, Pada tanggal 5 Desember 2023, transkrip.

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Selly selaku Ibu balita stunting, Pada tanggal 19 Desember 2023, transkrip.

merupakan masalah bersama untuk menurunkan angka stunting.<sup>37</sup>

Hal tersebut memiliki kesamaan dengan yang dikatakan oleh Bidan Desa Gribig, Bidan Desa Rejosari, Nutrisionis Puskesmas Gribig, Sekretaris Desa Rejosari, dan Kepala Dusun Desa Gribig yang mengatakan bahwa:

“Tidak ada mbak, apabila kita sudah tahu penyebab anak mengalami stunting, kita lakukan tindakan lebih lanjut. Setiap bulan itu kita ada posyandu. Anak-anak yang mengalami stunting itu kita dampingi untuk pemberian PMT-nya, kita konsultasikan pada Puskesmas lewat bidan Desa agar diberikan nutrisi tambahan dari Puskesmas.”

Hal tersebut menggambarkan bahwa tidak ada ego sektoral untuk mengimplementasikan kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting. Penanganan stunting di Desa Gribig seperti yang dikatakan oleh Kepala Dusun Desa Gribig adalah dengan melakukan pendampingan dan pemberian PMT bagi anak yang mengalami stunting dengan mengkonsultasikan pada Puskesmas lewat Bidan Desa agar diberikan nutrisi tambahan dari Puskesmas. Kerjasama yang dilakukan antara *stakeholder* tersebut berhasil menurunkan angka stunting dengan hasil yang sangat positif.<sup>38</sup>

Lain halnya dengan yang dikatakan oleh Nutrisionis Puskesmas Rejosari yang menuturkan bahwa:

“Setiap kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat banyak pasti akan timbul pertentangan dan penolakan, namun itu menjadikan kami semakin semangat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai tenaga Kesehatan dan berusaha untuk memperkecil pertentangan tersebut”.

---

<sup>37</sup> Hasil Wawancara dengan Nuryanto, S.KM., MM selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Pada tanggal 13 Desember 2023, transkrip.

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Sunarsih selaku Kepala Dusun Desa Gribig, Pada tanggal 6 Desember 2023, transkrip.

Dengan demikian, maka peneliti melaksanakan wawancara khusus kepada informan yaitu ibu balita stunting, bahwa:

“Alhamdulillah, anak kami sudah dilakukan penanganan stunting contohnya pemeriksaan, pemberian susu, biskuit dan makanan tambahan yang bergizi. Sekarang pun kita masih dalam pengawasan untuk mengetahui apakah ada perubahan atau tidak. Tadi barusan ditanya BB anak saya mbak sama pihak Balai Desa”.

Hasil wawancara tersebut bisa diketahui bahwasanya anak yang mengalami stunting dilakukan penanganan seperti pemeriksaan, pemberian susu, biskuit dan makanan tambahan yang bergizi.<sup>39</sup> Senada dengan orang tua yang mengalami stunting, adapun informan yang mengatakan bahwa:

“Kalau masalah tentang penanggulangan stunting memang ada, contohnya seperti pemeriksaan kesehatan dan pemberian makanan tambahan, banyak mbak pokoknya. Setelah itu kita masih di awasi dalam hal pengawasan anak kami apakah mengalami perubahan atau tidak”.

Dari hasil wawancara kepada orang tua anak stunting, maka bisa diketahui bahwa penanggulangan stunting di Kabupaten Kudus sudah dilaksanakan dengan baik. Penanggulangan tersebut dilakukan dengan memberikan vitamin, makanan tambahan yang bergizi, dan lainnya serta melakukan pengawasan apakah terdapat perubahan atau tidak.<sup>40</sup>

## 2. Penempatan staf birokrasi

Penempatan staf birokrasi terkait pengimplementasian kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Kudus sebagaimana yang dikatakan oleh Nuryanto selaku Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus bahwa:

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Ni'matul Khasanah selaku Ibu balita stunting, Pada tanggal 19 Desember 2023, transkrip

<sup>40</sup> Hasil Wawancara dengan Selly selaku Ibu balita stunting, Pada tanggal 18 Desember 2023, transkrip

“Mengimplementasikan penanggulangan stunting ini kita tetap membuat tim secara internal itu ada, termasuk tim percepatan penanganan stunting di tingkat Kabupaten juga ada. Disamping itu kita juga menggunakan tenaga ahli gizi yang ada. Kemudian implementasinya kita juga punya inovasi yang namanya rumah bintangku yang ada di Kecamatan Jati. Jadi, itu setiap hari melayani penimbangan, pengukuran badan, dan panjang badan, kemudian diintervensi ya. Setiap hari Kamis itu kita mendatangkan dokter ahli penyakit anak ya, kemudian ahli wicara psikologi yaitu yang tujuannya kita membuka inovasi itu untuk melayani mungkin yang nggak sempat ke Rumah Sakit bisa ke Rumah Bintangku yang ada di Jati. Itu salah satu upaya implementasinya stunting yang ada di Kabupaten Kudus”.

Kesimpulannya, guna mengimplementasikan kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Kudus, dibentuk tim internal dan tim percepatan penanganan stunting. Selain itu, melibatkan ahli gizi yang ada. Sebagai inovasi, di Kecamatan Jati terdapat "Rumah Bintangku" yang setiap hari melayani penimbangan, pengukuran, dan intervensi stunting.<sup>41</sup>

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan Sri Heny Wahyuningsih, SKM mengatakan bahwa tim dibentuk berdasarkan beberapa aspek penilaian yang melalui beberapa tahapan sehingga tim diharapkan bisa solid dan berkomitmen dalam melaksanakan tugasnya.<sup>42</sup>

Hal tersebut mempunyai kesamaan dengan yang diungkapkan oleh Kepala Dusun Desa Gribig dan Nutrisi Puskesmas Gribig bahwa terkait staf birokrasi guna mengimplementasikan kebijakan SDGs dalam

---

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan Nuryanto, S.KM., MM selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Pada tanggal 13 Desember 2023, transkrip.

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dengan Sri Heny Wahyuningsih, SKM selaku Nutrisi Puskesmas Rejosari, Pada tanggal 23 Desember 2023, transkrip.

penanggulangan stunting yakni memiliki keahlian khusus dibidangnya.<sup>43</sup>

Sedangkan Sekretaris Desa Rejosari yang menyampaikan bahwa “Kalau kader Posyandu ya yang penting mau bekerja sama sesuai kemampuan dan memaksimalkan kerjasama itu di bidang Posyandu”.

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa guna mengimplementasikan kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting tidak ada kriteria khusus untuk kader posyandunya, yang penting adalah mau bekerja sama sesuai kemampuan.<sup>44</sup>

### 3. Faktor pendorong/motivasi bagi pelaksana kebijakan

Faktor pendorong atau motivasi bagi pelaksana kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Kudus sebagaimana yang dikemukakan oleh Nuryanto selaku Kabid Kesmas Dinas kesehatan Kabupaten Kudus “Untuk faktor pendorongnya ya jelas untuk menurunkan angka stunting itu sendiri”.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa faktor pendorong utama untuk mengimplementasikan kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting yaitu upaya penurunan angka stunting adalah tekad untuk menurunkan prevalensi stunting itu sendiri.<sup>45</sup> Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh Sekretaris Desa Rejosari, Bidan Desa Gribig dan Nutrisisionis Puskesmas Gribig yang mengatakan bahwa “Menurunkan prevalensi stunting di wilayah Puskesmas Gribig”.<sup>46</sup>

Berbeda dengan hasil wawancara peneliti dengan Nutrisisionis Puskesmas Rejosari dapat diketahui bahwa motivasi untuk mengimplementasikan kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting adalah untuk

---

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan Noviani Dewi Maharani, S.Gz selaku Nutrisisionis Puskesmas Gribig, Pada tanggal 22 Desember 2023, transkrip.

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan Agung Triyatno selaku Sekretaris Desa Rejosari, Pada tanggal 5 Desember 2023, transkrip.

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Nuryanto, S.KM., MM selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Pada tanggal 13 Desember 2023, transkrip.

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Noviani Dewi Maharani, S.Gz selaku Nutrisisionis Puskesmas Gribig, Pada tanggal 22 Desember 2023, transkrip.



mengentaskan kemiskinan, kelaparan dan meningkatkan pendidikan”.<sup>47</sup>

Wawancara peneliti dengan Kepala Dusun Desa Gribig mengungkapkan bahwa “Kalau dukungan sangat mendukung sekali dari semua pihak semuanya mendukung”.<sup>48</sup>

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Bidan Desa Rejosari mengungkapkan bahwa:

“Partisipasi dari kader yang mau datang ke posyandu, jadi dia memberikan informasi tentang pelaksanaan posyandu. Kemudian dukungan dari pemerintah desa juga, karena kalau untuk pelaksanaan posyandu itu kan punya Desa, jadi kita itu kan dari tenaga kesehatan kan cuma pelaksana. Jadi sebenarnya yang punya posyandu itu desa, jadi kita dan Puskesmas itu hanya pelaksana kesehatan saja. Jadi untuk penyediaan PMT nya juga dari desa, untuk kadernya juga dari desa gitu. Jadi ya *support* terbesar memang dari desa”.

Kesimpulannya, partisipasi dari kader yang mau datang dan memberikan informasi tentang pelaksanaan posyandu serta dukungan dari pemerintah desa merupakan sebuah faktor yang menjadi pendorong untuk menanggulangi stunting.<sup>49</sup>

#### d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki peranan penting dalam mengefektifkan implementasi kebijakan. Aspek yang penting dari struktur birokrasi merupakan terdapatnya prosedur operasi standar (*Standard Operating Procedures*) atau SOP. Dengan demikian, penanggulangan Stunting di Kabupaten Kudus dilakukan wawancara dengan Nuryanto selaku Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus yang mengemukakan bahwasanya SOP untuk

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Sri Heny Wahyuningsih, SKM selaku Nutrisionis Puskesmas Rejosari, Pada tanggal 23 Desember 2023, transkrip.

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Sunarsih selaku Kepala Dusun Desa Gribig, Pada tanggal 6 Desember 2023, transkrip.

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan Putri Wulan Muta'aliyah, Amd.Keb selaku Bidan Desa Rejosari, Pada tanggal 08 Desember 2023, transkrip.

mengimplementasikan kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting otomatis ada. Penanganan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dalam menanggulangi stunting adalah dari hulu ke hilir. Alurnya yaitu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus ke Puskesmas, kemudian dari Puskesmas ke Desa.<sup>50</sup> Hal tersebut menggambarkan adanya sistem yang terorganisir dengan baik dalam upaya penanggulangan stunting. Dengan alur yang terstruktur dari tingkat Kabupaten ke tingkat Desa, pelaksanaan penanggulangan stunting berjalan dengan baik dan terkoordinasi.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Nutrisionis Puskesmas Rejosari “Memiliki SOP, KAK dan Pedoman kegiatan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, sejauh ini sudah efektif dan efisien”.

Wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan SDGs dalam menanggulangi stunting Puskesmas Rejosari memiliki SOP, KAK, dan pedoman kegiatan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>51</sup> Hal tersebut memiliki kesamaan dengan yang dikatakan oleh Nutrisionis Puskesmas Gribig, yakni “SOP ada, sesuai dengan masing-masing kegiatan upaya pencegahan dan penanggulangan stunting. Struktur petugas penanggulangan stunting di puskesmas ada dan sejauh ini sudah efektif, berjalan sesuai tupoksinya”.

Kesimpulannya, menurut Nutrisionis Puskesmas Gribig untuk mengimplementasikan kebijakan SDGs dalam menanggulangi stunting Puskesmas Gribig memiliki SOP, struktur petugas penanggulangan stunting di puskesmas sudah ada dan terbukti efektif. Struktur tersebut berjalan sesuai dengan tupoksinya, menggambarkan bahwa upaya penanggulangan stunting di Puskesmas Gribig dilaksanakan dengan baik.<sup>52</sup>

Kemudian, wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Agung Triyatno menuturkan bahwa “Tentunya

---

<sup>50</sup> Hasil Wawancara dengan Nuryanto, S.KM., MM selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Pada tanggal 13 Desember 2023, transkrip.

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan Sri Heny Wahyuningsih, S.KM selaku Nutrisionis Puskesmas Rejosari, Pada tanggal 23 Desember 2023, transkrip.

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Noviani Dewi Maharani, S.Gz selaku Nutrisionis Puskesmas Gribig, Pada tanggal 22 Desember 2023, transkrip.

kita dalam menanggulangi stunting ini sesuai dengan juknis yang ada mbak”.<sup>53</sup>

Struktur birokrasi sebagaimana hasil wawancara yang telah dilaksanakan peneliti dengan Kepala Dusun Desa Gribig dapat diketahui bahwa untuk menanggulangi stunting adalah dengan melibatkan berbagai pihak, seperti Pemerintah Desa yang menjadi pangkal dari pengelolaan program. Selain itu, ada posyandu di Desa yang secara rutin melakukan pemantauan terkait pertumbuhan balita. Bidan Desa juga ikut serta membantu dalam memberikan layanan kesehatan, memberikan informasi gizi kepada ibu hamil dan balita, serta berkolaborasi dengan Posyandu untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan penanggulangan stunting di desa.<sup>54</sup>

## 2. Faktor Pendorong dan Penghambat Pengimplementasian Kebijakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Kudus

Faktor pendorong untuk mengimplementasikan kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Kudus sebagaimana yang dikemukakan oleh Nuryanto selaku Kabid Kesmas Dinas kesehatan Kabupaten Kudus “Untuk faktor pendorongnya ya otomatis untuk menurunkan angka stunting itu sendiri”.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa faktor pendorong utama untuk mengimplementasikan kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting yaitu upaya menurunkan prevalensi stunting itu sendiri. Pernyataan tersebut menekankan pada keinginan dan komitmen guna meminimalisir masalah stunting sebagai dorongan utama dalam menyusun dan melakukan program-program penanggulangan stunting.<sup>55</sup> Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh Sekretaris Desa Rejosari, Bidan Desa Gribig dan Nutrisisionis Puskesmas Gribig

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Agung Triyatno selaku Sekretaris Desa Rejosari, Pada tanggal 5 Desember 2023, transkrip.

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Sunarsih selaku Kepala Dusun Desa Gribig, Pada tanggal 6 Desember 2023, transkrip.

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Nuryanto, S.KM., MM selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Pada tanggal 13 Desember 2023, transkrip.

bahwa “Menurunkan prevalensi stunting di wilayah Puskesmas Gribig”.<sup>56</sup>

Hasil wawancara tersebut bisa diketahui bahwa faktor pendorong untuk melaksanakan penanggulangan stunting yaitu guna menurunkan prevalensi stunting itu sendiri. Pernyataan ini menegaskan keselarasan antara pandangan Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Sekretaris Desa Rejosari, Bidan Desa Gribig dan Nutrisionis Puskesmas Gribig dengan tujuan umum untuk mengurangi angka stunting.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Nutrisionis Puskesmas Rejosari “Mengentaskan kemiskinan, kelaparan dan meningkatkan pendidikan”.

Berdasarkan pernyataan dari Nutrisionis Puskesmas Rejosari tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa faktor pendorong untuk mengimplentasikan kebijakan SDGs dalam menanggulangi stunting adalah guna mengentaskan kemiskinan, kelaparan, serta meningkatkan pendidikan.<sup>57</sup>

Wawancara dengan Bidan Desa Rejosari juga dilakukan oleh peneliti, yakni:

“Partisipasi dari kader yang mau datang ke posyandu, jadi dia memberikan informasi tentang pelaksanaan posyandu. Kemudian dukungan dari pemerintah desa juga, karena kalau untuk pelaksanaan posyandu itu kan punyanya Desa, jadi kita itu kan dari tenaga kesehatan kan cuma pelaksana. Jadi sebenarnya yang punya posyandu itu desa, jadi kita dan Puskesmas itu hanya pelaksana kesehatan saja. Jadi untuk penyediaan PMT nya juga dari desa, untuk kadernya juga dari desa gitu. Jadi ya support terbesar memang dari desa”.

Kesimpulannya, partisipasi dari kader yang mau datang dan memberikan informasi tentang pelaksanaan posyandu serta dukungan dari pemerintah desa merupakan sebuah faktor yang menjadi pendorong untuk menanggulangi stunting.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Noviani Dewi Maharani, S.Gz selaku Nutrisionis Puskesmas Gribig, Pada tanggal 22 Desember 2023, transkrip.

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Sri Heny Wahyuningsih, S.KM selaku Nutrisionis Puskesmas Rejosari, Pada tanggal 23 Desember 2023, transkrip.

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Putri Wulan Muta'aliyah, Amd.Keb selaku Bidan Desa Rejosari, Pada tanggal 08 Desember 2023, transkrip.

Selanjutnya, wawancara peneliti dengan Kepala Dusun Desa Gribig mengungkapkan bahwa “Kalau dukungan sangat mendukung sekali dari semua pihak semuanya mendukung”.<sup>59</sup>

Adapun hambatan untuk pengimplementasian kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting oleh Dinas Kesehatan terkait dalam penanganan stunting ini dijelaskan langsung melalui wawancara penulis dengan Nuryanto selaku Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus:

“Yang menjadi hambatan mungkin kerjasama lintas sektoral yang kurang kuat ya. Seolah-olah stunting ini menjadi tugasnya orang kesehatan saja, tapi tidak seperti itu. Ini semua adalah konvergensi semua lintas sektoral, semua kalangan baik negeri maupun swasta, pemerintah daerah ini yang meminta harus konvergensi, harus bersama-sama, harus bersinergi. Tatkala ini nanti bisa bersinergikan, saya kira stunting angkanya bisa dibawah standar gitu”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa salah satu hambatan penanggulangan masalah stunting yakni kerjasama lintas sektoral yang kurang kuat. Penanggulangan stunting bukan hanya tanggung jawab pihak kesehatan saja, melainkan perlunya kontribusi dari beberapa sektor dan pihak, baik pemerintah maupun swasta. Pentingnya konvergensi, kolaborasi, dan sinergi antar berbagai pihak diharapkan bisa menurunkan angka stunting. Dengan demikian, guna mencapai hasil yang maksimal, diperlukan partisipasi aktif dari seluruh sektor dan pihak terkait.<sup>60</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Nutrisisionis Puskesmas Gribig yang mengatakan bahwa hambatan untuk mengimplementasikan kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting yaitu merubah perilaku orang tua terkait pengelolaan ekonomi keluarga serta kesalahan dalam pola asuh merupakan hambatan dalam upaya penanggulangan stunting.<sup>61</sup>

Lain halnya dengan yang dikatakan oleh Sri Heny Wahyuningsih, SKM selaku Nutrisisionis Puskesmas Rejosari,

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Sunarsih selaku Kepala Dusun Desa Gribig, Pada tanggal 6 Desember 2023, transkrip.

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Nuryanto, S.KM., MM selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Pada tanggal 13 Desember 2023, transkrip.

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan Noviani Dewi Maharani, S.Gz selaku Nutrisisionis Puskesmas Gribig, Pada tanggal 22 Desember 2023, transkrip.

yakni “Tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua yang rendah menjadi penghambat”.

Mengenai hal tersebut bisa diketahui bahwa bahwa tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua yang rendah menjadi penghambat dalam menanggulangi stunting. Tingkat pendidikan yang rendah bisa menghambat pemahaman orang tua tentang gizi dan perawatan anak, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keputusan terkait pola asuh dan pemenuhan nutrisi anak.<sup>62</sup>

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan Putri Wulan Muta’alayah, Amd.Keb selaku Bidan Desa Rejosari terkait hambatan implementasi kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting yakni kendala utama dalam penanggulangan stunting adalah kesibukan ibu yang bekerja, khususnya yang bekerja di pabrik. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya keterbatasan waktu yang dimiliki oleh ibu yang bekerja dalam memberikan perhatian dan pemenuhan nutrisi yang cukup kepada anak-anak mereka.

“Kendalanya ya tadi banyak ibu yang bekerja atau kesibukan dari orang tuanya yang banyak bekerja di pabrik sehingga menjadi kendala dalam penanggulangan stunting. Hal ini karena ibu yang bekerja kan cenderung memiliki waktu yang terbatas untuk memberikan perhatian dan pemenuhan gizi yang cukup pada anak-anak mereka”.<sup>63</sup>

Selain itu, adapun pernyataan dari Bidan Desa Gribig yang mengatakan bahwa:

“Kendalanya ya itu, misalnya dalam penanganan operatif dari keluarga dari ibu, SDM nya gimana, *mindset* nya bagaimana. Kadang kan mbahnya ikut campur terkait pola asuh anak gitu, apa si stunting-stunting kaya gitu, itu kendalanya kita yang pertama. Yang kedua kadang-kadang belum *tercover* BPJS walaupun misalnya PMT yang dari Dinas Kesehatan itu tidak memandang dia punya BPJS atau tidak tetap dikasih PMT. Tapi kendalanya yang harus dirujuk ke Rumah Sakit itu yang

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan Sri Heny Wahyuningsih, S.KM selaku Nutritionis Puskesmas Rejosari, Pada tanggal 23 Desember 2023, transkrip.

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Putri Wulan Muta’alayah, Amd.Keb selaku Bidan Desa Rejosari, Pada tanggal 08 Desember 2023, transkrip.

harus membutuhkan BPJS, karena nanti membutuhkan obat”.

Terdapat dua hambatan terkait implementasi kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting seperti yang telah dikemukakan oleh Bidan Desa Gribig. Pertama, kendala terkait dengan sumber daya manusia (SDM) dan pola pikir (*mindset*) dari keluarga, terutama dalam hal pola asuh anak. Kedua, kendala terkait dengan aksesibilitas layanan kesehatan, seperti masalah BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) meskipun dalam pemberian PMT tidak memandang kepunyaan terhadap BPJS, akan tetapi tentang keperluan apabila anak stunting tersebut harus dirujuk ke Rumah Sakit untuk mendapatkan obat yang dibutuhkan.<sup>64</sup>

Menurut keterangan dari Sekretaris Desa Rejosari mengemukakan bahwa “Kadang ada orang tua yang ibaratnya menggampangkan ketika anaknya mengalami stunting. Ya malu mbak ketika anaknya dikatakan stunting, padahal anaknya kan memang aktif begitu”.

Kesimpulan dari keterangan Sekretaris Desa Rejosari adalah bahwa salah satu hambatan terkait implementasi kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting adalah karena terdapat persepsi masyarakat yang menganggap remeh masalah stunting. Beberapa orang tua cenderung meremehkan kondisi stunting anak. Kurangnya kesadaran dan pemahaman orang tua anak tentang stunting dapat menjadi hambatan dalam mengambil langkah-langkah penanggulangan yang dibutuhkan.<sup>65</sup>

### 3. Strategi Implementasi Kebijakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam Penanggulangan Stunting di Kabupaten Kudus

Dengan adanya faktor penghambat yang sudah dijelaskan diatas, *stakeholder* di Kabupaten Kudus berupaya untuk mencegah hambatan dalam implementasi kebijakan. Dalam mengimplementasikan kebijakan SDGs terkait penanggulangan stunting, *stakeholder* di Kabupaten Kudus memiliki strategi khusus agar pelaksanaan penanggulangan stunting sesuai dengan

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Ulya Mabruroh, Amd.Keb selaku Bidan Desa Gribig, Pada tanggal 18 Desember 2023, transkrip.

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Agung Triyatno selaku Sekretaris Desa Rejosari, Pada tanggal 5 Desember 2023, transkrip.

yang diharapkan. Berikut adalah hal-hal yang dilakukan sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus:

“Strateginya ya kita melakukan advokasi, kita melakukan pendekatan kepada pejabat yang lebih tinggi atau atasan yang lebih tinggi, kepada Bupati agar bersama oh ini lo stunting. Stunting ini adalah pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama bukan satu OPD yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus saja tapi semuanya bergerak seperti itu”.

Dari wawancara tersebut, bisa dilihat bahwa strategi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dalam mengatasi hambatan penanggulangan stunting adalah melaksanakan advokasi dan pendekatan kepada pejabat tinggi, terutama Bupati. Selain itu, pentingnya keterlibatan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh lapisan masyarakat dalam upaya bersama mengatasi stunting di Kabupaten Kudus sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya terbatas pada Dinas Kesehatan saja.<sup>66</sup>

Wawancara dengan Nutrisisionis Puskesmas Rejosari mengemukakan bahwa upaya yang dilaksanakan guna mencegah hambatan terkait implementasi penanggulangan stunting adalah dengan melibatkan kerja sama lintas sektoral dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Hal tersebut menggambarkan strategi kolaboratif dalam pendekatan kesehatan, yang tidak hanya melibatkan pihak kesehatan saja, tetapi juga melibatkan sektor-sektor terkait dan pihak desa sebagai bagian dalam pencapaian tujuan penanggulangan stunting.<sup>67</sup> Hal tersebut sejalan dengan yang dimukakan oleh Nutrisisionis Puskesmas Gribig “Kerjasama dengan lintas sektor terkait seperti Dinas Sosial, Dinas PMD dan dinas terkait lainnya”.

Nutrisisionis Puskesmas Gribig memberikan pernyataan tentang strategi yang dilakukan adalah dengan kerja sama lintas sektoral dalam penanggulangan masalah stunting. Tantangan atau hambatan yang ada tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Nuryanto, S.KM., MM selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Pada tanggal 13 Desember 2023, transkrip.

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan Sri Heny Wahyuningsih, S.KM selaku Nutrisisionis Puskesmas Rejosari, Pada tanggal 23 Desember 2023, transkrip.



sektor, tapi memerlukan sinergi antara berbagai instansi pemerintah terkait. Kerja sama dengan Dinas Sosial serta Dinas terkait lainnya merupakan langkah yang penting dalam mengatasi hambatan tersebut dalam menangani masalah stunting. Kesimpulan ini menggambarkan bahwa guna hasil yang diperoleh bisa maksimal dalam melakukan penanggulangan stunting, diperlukan kolaborasi yang erat antara sektor-sektor terkait.<sup>68</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bidan Desa Rejosari “Nah itu kan kita ada penyuluhan tadi mbak dengan mencari solusi bersama agar bisa meningkatkan kesadaran orang tua anak stunting terkait pentingnya asupan gizi dan pola asuh begitu”.

Penyuluhan menjadi strategi yang dilaksanakan guna mengatasi hambatan implementasi kebijakan SDGs dalam menanggulangi stunting. Penyuluhan dilakukan dengan memberikan pengetahuan ataupun pemahaman kepada orang tua terkait dampak langsung dari kurangnya asupan yang bergizi serta tidak tepatnya pola asuh terhadap pertumbuhan anak, khususnya yang mengalami stunting.<sup>69</sup> Hal tersebut juga mempunyai kesamaan dengan yang dikatakan oleh Bidan Desa Gribig “Strateginya kita lewat penyuluhan dengan memberikan pemahaman yang baik tentang pola asuh anak mbak. Tak lupa juga untuk bekerja sama dengan pihak terkait agar penanganan stunting ini bisa maksimal begitu”. Upaya penyuluhan yang dilakukan menjadi langkah awal terkait mengatasi hambatan yang ada. Selain itu juga dilaksanakannya kerja sama dengan sektor terkait agar penanganannya bisa maksimal.<sup>70</sup>

Sekretaris Desa Rejosari mengemukakan bahwa:

“Ya kita dekati, ibaratnya kita bujuklah agar mau datang ke posyandu. Soalnya kan partisipasi dari ibu ataupun orang tua anak stunting ini penting dalam kegiatan Posyandu untuk memantau pertumbuhan anak-anak dan mendapatkan informasi serta layanan kesehatan yang diperlukan. Oleh karena itu, kami melakukan pendekatan

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Noviani Dewi Maharani, S.Gz selaku Nutrisionis Puskesmas Gribig, Pada tanggal 22 Desember 2023, transkrip.

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Putri Wulan Muta'aliyah, Amd.Keb selaku Bidan Desa Rejosari, Pada tanggal 08 Desember 2023, transkrip.

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan Ulya Mabruroh, Amd.Keb selaku Bidan Desa Gribig, Pada tanggal 18 Desember 2023, transkrip.

dan memberikan pemahaman kepada mereka mengenai manfaat dan tujuan Posyandu. Kami jelaskan bagaimana Posyandu itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemeriksaan kesehatan anak, tetapi juga sebagai wadah untuk mendapatkan edukasi kesehatan, nutrisi, serta bisa memantau pertumbuhan dan perkembangan anak itu”.

Pernyataan tersebut menggambarkan usaha nyata dalam mendekati dan meyakinkan orang tua agar mau menghadiri Posyandu. Pemahaman mereka mengenai peran Posyandu yang lebih luas diharapkan bisa membawa dampak positif dalam meningkatkan partisipasi, mendukung pemantauan kesehatan anak, hingga pada akhirnya membantu menanggulangi masalah stunting.<sup>71</sup>

#### **4. Dampak Stunting Bagi Perekonomian di Kabupaten Kudus**

Dampak dari adanya masalah stunting bukan hanya pada masalah kesehatan yang terjadi pada anak-anak saja melainkan juga berdampak pada perekonomian suatu daerah. Hal tersebut berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Sunarsih selaku Kepala Dusun Desa Gribig yang mengungkapkan bahwa “Kalau dampak mungkin dana desa yang dikeluarkan banyak ya mbak untuk menanggulangi kasus stunting sendiri, seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya sekitar berapa ya banyak memang”.<sup>72</sup>

Kesimpulan dari wawancara tersebut yakni dampak dari adanya stunting mempengaruhi dana desa yang harus dikeluarkan lebih banyak untuk menanggulangi kasus stunting di Desa Gribig.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Agung Triyatno selaku Sekretaris Desa Rejosari, yakni:

“Dampak kalau stunting banyak itu nggih banyak mbak, seperti semakin banyak anak yang stunting di desa kan untuk pertumbuhan ekonomi dan lain-lain nanti kedepannya kan juga mempengaruhi mbak. Terus yang kedua pengeluaran desa meningkat tentunya, tapi tetap kita anggarakan semaksimal mungkin untuk penurunan

---

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan Agung Triyatno selaku Sekretaris Desa Rejosari, Pada tanggal 5 Desember 2023, transkrip.

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan Sunarsih selaku Kepala Dusun Desa Gribig, Pada tanggal 26 Maret 2024, transkrip.

stunting tersebut seperti tambahan-tambahan makanan, tambahan-tambahan PMT, dan sebagainya begitu mbak”<sup>73</sup>.

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa tingginya angka stunting mempunyai dampak besar, termasuk potensi pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi kedepannya dan pengeluaran desa yang meningkat.

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Analisis Implementasi Kebijakan SDGs dalam Penanggulangan Stunting di Kabupaten Kudus

Implementasi Kebijakan SDGs dalam Penanggulanag Stunting di Kabupaten Kudus dilihat dari berbagai indikator dengan teori George Edward III yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

##### a. Komunikasi

Komunikasi adalah salah satu hal penting yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan publik untuk menentukan keberhasilan tujuan dari implementasi kebijakan publik yang dicapai. Komunikasi dalam penelitian ini dinilai dari transmisi, kejelasan dan konsistensi.

##### 1. Transmisi

Terdapat realita yang terjadi di lapangan bahwa Kabupaten Kudus mengkomunikasikan implementasi kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Kudus didasarkan pada dasar hukum yang kuat, seperti Perpres, Pergub, dan Perbup. Implementasi kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Kudus melibatkan berbagai instansi dan pemangku kepentingan. Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dalam hal ini telah menetapkan dasar hukum yang kuat, membentuk tim audit dan tim percepatan penanggulangan stunting, serta melaksanakan intervensi spesifik dan sensitif. Penyampaian implementasi kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting dilaksanakan melalui beragam kegiatan lintas program dan sektoral. Kolaborasi dengan masyarakat, termasuk partisipasi ibu balita merupakan salah satu hal untuk

---

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Agung Triyatno selaku Sekretaris Desa Rejosari, pada tanggal 24 Maret 2024, transkrip.

mencapai tujuan implementasi kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting. Dengan penyuluhan, sosialisasi, dan kegiatan posyandu berperan penting dalam mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat. Adanya pemahaman dari ibu balita stunting tentang sosialisasi ataupun penyuluhan stunting, menunjukkan efektivitas upaya komunikasi tersebut dalam memberikan informasi dan solusi pada penanggulangan stunting.

## 2. Kejelasan

Kejelasan terkait implementasi kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Kudus telah terlihat melalui langkah-langkah yang diambil oleh beberapa *stakeholder* di Kabupaten Kudus. Langkah-langkah seperti upaya untuk aksi bergizi, memberikan edukasi atau sosialisasi kepada calon pengantin dan ibu hamil, menyediakan fasilitas kesehatan yang mendukung, pemantauan antropometri kasus gizi kurang dan gizi buruk oleh kader, monitoring dan evaluasi dalam pemberian makanan tambahan, perujukan ke dokter spesialis anak, melaksanakan intervensi spesifik dan sensitive, kegiatan rutin di Posyandu, serta koordinasi lintas sektor menjadi bagian dari upaya yang dilakukan adalah sudah secara jelas dalam upaya penanggulangan stunting.

## 3. Konsistensi

Konsistensi guna mengimplementasikan kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Kudus yang dilakukan oleh para *stakeholder* menegaskan pentingnya intervensi spesifik dan sensitif, serta evaluasi secara berkala guna memastikan keberlanjutan dan perbaikan program yang ada. Selanjutnya adalah Semua kegiatan Rembug stunting tingkat desa, rembug stunting tingkat kecamatan, lokakarya mini lintas sektor, musyawarah masyarakat desa, serta saling bekerja sama dan berupaya untuk membuat resep yang sesuai dengan selera sasaran dan nilai gizi yang dianjurkan. Selain itu, kolaborasi dengan desa, fokus pada peran kader kesehatan di tingkat desa yang memantau kesehatan balita, serta Posyandu dan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) lebih ditingkatkan.

## b. Sumber Daya

Sumber daya adalah hal penting dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan. Indikator-indikator yang dilakukan guna mengukur sejauh mana sumber daya berpengaruh pada implementasi kebijakan sumber daya mencakup jumlah dan kualitas staf, informasi yang tepat dan relevan, wewenang, dan fasilitas.

### 1. Jumlah dan kualitas staf

Jumlah dan kualitas staf di Kabupaten Kudus untuk mengimplementasikan kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah memadai dan sesuai dengan bidangnya. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk tenaga kesehatan dan kader-kader, membuat tim khusus penanggulangan stunting merupakan upaya sinergis dalam menanggulangi stunting ini. Pentingnya kualitas dari tenaga kesehatan yang memiliki keahlian terkait penanggulangan stunting maupun dari kader-kader masyarakat, menciptakan kerjasama yang efektif.

### 2. Informasi yang tepat dan relevan

Informasi yang dimaksud dalam konteks ini merupakan data yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Kudus, seperti pengumpulan data dari Posyandu, jejaring dengan dokter, PMD, klinik, dan rumah sakit, serta informasi yang disampaikan melalui media sosial dan grup WhatsApp yang telah dibuat oleh *stakeholder*. Kerjasama antar beberapa *stakeholder* dan pemantauan perkembangan anak di Posyandu sangat penting dalam mendukung implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Kudus.

### 3. Wewenang

Wewenang dari *stakeholder* yang ada di Kabupaten Kudus guna mengimplementasikan kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting adalah melakukan advokasi dengan lintas sektoral, melakukan kegiatan pendanaan, pengadaan makanan tambahan, susu, melaksanakan kegiatan penanggulangan stunting, dan melakukan pemantauan perkembangan balita. Dengan adanya wewenang yang terkoordinasi ini, implementasi kebijakan penanggulangan stunting menunjukkan kolaborasi antar lembaga dan lintas sektoral untuk

mencapai tujuan implementasi kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Kudus.

#### 4. Fasilitas

Fasilitas yang memadai, baik anggaran maupun fasilitas kerja, sangat mendukung pelaksanaan kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Kudus. Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus memfasilitasi Posyandu dengan alat timbang yang sama, memberikan PMT khusus untuk anak-anak stunting, dan melakukan rujukan ke Rumah Sakit untuk penanganan khusus bagi anak stunting. Selain itu, terdapat juga PMT (Pemberian Makanan Tambahan) lokal yang diberikan kepada ibu hamil dan bayi atau anak stunting yang dilaksanakan oleh kader-kader Desa. Fasilitas yang memadai tersebut juga diakui oleh ibu balita stunting yang merasa terbantu dengan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) dan penyuluhan yang diberikan.

#### c. Disposisi

Disposisi adalah hal penting dalam mencapai keefektifan dari implementasi kebijakan. Jika implementor mempunyai sikap yang baik, hasilnya implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Namun, jika implementor mempunyai perbedaan perspektif atau sifat, maka akan terjadi ketidak efektifan implementasi kebijakan. Dalam hal ini, disposisi mencakup:

##### 1. Sikap ego sektoral

Fakta lapangan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Kudus berjalan tanpa adanya masalah ego sektoral, karena hal tersebut merupakan masalah bersama agar angka stunting bisa turun meskipun akan timbul pertentangan dan penolakan. Namun *stakeholder* terkait tetap menjadikan semangat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban serta berusaha untuk memperkecil pertentangan tersebut. Koordinasi lintas sektoral terlihat baik dan para implementator menunjukkan komitmen tinggi dalam mencapai tujuan penanggulangan stunting, dan terlihat adanya koordinasi yang baik antara pihak terkait.

## 2. Penempatan staf birokrasi

Guna mengimplementasikan kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Kudus, penempatan staf birokrasi melibatkan pembentukan tim internal dan tim percepatan penanganan stunting, serta melibatkan ahli gizi. Sebagai inovasi, di Kecamatan Jati, "Rumah Bintangku" menjadi pusat pelayanan harian yang melibatkan dokter anak dan ahli psikologi untuk memberikan intervensi. Selain itu, dalam pembentukan tim didasarkan atas beberapa aspek dan penilaian yang diharapkan tim dapat bekerja secara solid dan berkomitmen. Sedangkan untuk kader Posyandu tidak ada kriteria khusus yang harus dipenuhi, namun yang terpenting adalah kemauan untuk bekerja sama sesuai dengan kemampuan masing-masing

## 3. Faktor pendorong/motivasi pelaksana kebijakan

Faktor pendorong/motivasi pelaksana dalam implementasi kebijakan SDGs penanggulangan stunting di Kabupaten Kudus adalah tekad untuk menurunkan angka stunting. Komitmen ini mencerminkan upaya serius dalam merancang dan melaksanakan program-program penanggulangan stunting. Selain itu, mengentaskan kemiskinan, kelaparan, meningkatkan pendidikan, dukungan semua pihak, partisipasi aktif kader yang memberikan informasi tentang pelaksanaan posyandu, serta dukungan dari pemerintah desa juga menjadi motivasi pelaksana kebijakan dalam melakukan penanggulangan stunting.

### d. Struktur Birokrasi

Birokrasi adalah salah satu hal yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi adalah guna menjalankan sebuah kebijakan tertentu. Salah satu dari aspek struktur birokrasi yang terpenting di setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standard Operating Procedures*) atau SOP.

SOP (*Standard Operating Procedures*) untuk mengimplementasikan kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting yang ada di Kabupaten Kudus, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus telah membentuk alur yang terorganisir, dimulai dari tingkat Kabupaten hingga tingkat Desa. Puskesmas Rejosari memiliki SOP, KAK, dan pedoman kegiatan yang sesuai

dengan aturan, menunjukkan keteraturan dalam implementasi kebijakan SDGs. Puskesmas Gribig memiliki struktur petugas yang efektif sesuai tupoksinya, menunjukkan keberhasilan dalam upaya penanggulangan stunting. Di tingkat desa yakni melibatkan Pemerintah Desa, Kader Posyandu, dan Bidan Desa dalam pemantauan dan penanggulangan stunting. Secara keseluruhan, struktur birokrasi ini berhasil menjalankan program penanggulangan stunting dengan baik dan terkoordinasi yang ada di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Kudus telah mengimplementasikan kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting dengan baik sesuai dengan Teori Implementasi Kebijakan George Edwards III. Terdapat empat variabel yakni *communication* (Komunikasi), *resources* (Sumber Daya), *disposition* (Sikap Pelaksana), dan *bureaucratic structure* (Struktur Birokrasi), dimana empat variabel tersebut telah diimplementasikan oleh seluruh pihak dengan pelayanan kesehatan, pemberian sosialisasi atau penyuluhan, kunjungan dan juga memberikan makanan tambahan pada anak stunting. Hal tersebut didukung penelitian dari Putri Wididiati, Herbasuki Nurcahyanto, Afular Marom yang menyatakan bahwa pengaplikasian program pencegahan stunting di Kabupaten Lombok Timur telah maksimal, dikarenakan dalam penanganan stunting mempunyai program berkualitas yang menyentuh setiap sendi permasalahan stunting.<sup>74</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Falentina Kiranasari, Ahmad Tohardi, dan Siti Aisyah memberikan penguatan bahwa Implementasi Kebijakan Percepatan Stunting pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, telah terlaksana dengan baik dan memiliki keberhasilan dalam upaya mengatasi stunting dengan menurunkan angka prevalensi stunting dari 38,2% menjadi 18,7% . Upaya yang terkoordinasi dan konsistensi untuk memahami substansi, keputusan, dan kepentingan, serta peraturan implementasi ditinjau berdasarkan perspektif

---

<sup>74</sup> Putri Wididiati, Herbasuki Nurcahyanto, and Afular Marom, "Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting Di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Di Desa Lenek Duren Kecamatan Lenek)," *Journal of Public Policy and Management Review* 11, no. 4 (2022): 1–16.



yang berbeda, seperti metode, kesempatan, maupun pelaksanaan strategi yakni keunggulan dari kebijakan yang sukses dilaksanakan.<sup>75</sup> Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Shinta Aurelia Rahmasari menjadi pendukung penelitian ini, yakni implementasi kebijakan pemerintah kabupaten Jember dalam menangani masalah stunting sudah terlaksana dengan baik, hal ini terbukti karena adanya komitmen pemerintah dalam menyusun tim khusus dan program khusus pencegahan stunting, bukan hanya itu pendanaan yang dilakukan dalam proses implementasi kebijakan ini pun sudah terlaksana dengan baik dan dilakukan penyesuaian dengan klasifikasi kebutuhan pemerintah.<sup>76</sup>

Menurut hasil analisis maka bisa disimpulkan bahwa implementasi kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting berjalan dengan baik. Temuan ini didukung oleh beberapa penelitian yang menegaskan bahwa implementasi kebijakan dan program penanggulangan stunting di berbagai daerah telah memberikan hasil yang positif dalam upaya menurunkan prevalensi stunting dengan menggunakan berbagai program maupun kebijakan yang telah diimplementasikan.

Dari rumusan masalah mengenai implementasi kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting menunjukkan Kabupaten Kudus telah berhasil mengimplementasikan kebijakan SDGs dengan baik dalam penanggulangan stunting dengan mengimplementasikan Teori Implementasi Kebijakan George Edwards III yang terdiri dari empat variabel yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hal tersebut dilakukan dengan mengkomunikasikan kebijakan kepada masyarakat dengan baik, melibatkan berbagai pihak, memanfaatkan sumber daya dengan baik, dan membentuk struktur birokrasi yang efektif. Implementasi kebijakan SDGs di Kabupaten Kudus menunjukkan

---

<sup>75</sup> Falentina Kiranasari, Ahmad Tohardi, and Siti Aisyah, "Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 2 (2024): 2216–27, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.4948>.

<sup>76</sup> Shinta Aurelia Rahmasari and Itok Wicaksono, "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Jember Dalam Upaya Percepatan Pencapaian Target Sustainable Development Goals," 2022, 162–70, <http://repository.unmuhjember.ac.id/15047/>.

komitmen untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan terkait dengan penanggulangan stunting. Implikasinya adalah terciptanya lingkungan yang mendukung untuk penanggulangan stunting sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak tidak terhambat. Dengan komunikasi yang baik, pemanfaatan sumber daya yang efektif, sikap positif dari pelaksana, dan struktur birokrasi yang terorganisir, Kabupaten Kudus mampu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan terkait penanggulangan stunting. Rekomendasi dari penelitian ini yakni: *Pertama*, meskipun komunikasi telah terlaksana dengan baik, disarankan untuk terus meningkatkan strategi komunikasi serta perlu ditingkatkan upaya dalam memastikan bahwa informasi terkait kebijakan SDGs dan penanggulangan stunting bisa mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. *Kedua*, guna menjaga keberlanjutan kebijakan perlu dilakukan evaluasi terhadap kebutuhan sumber daya, termasuk tenaga kesehatan dan dukungan dari pihak terkait. *Ketiga*, pemerintah dan instansi terkait perlu terus mendorong dan memberikan insentif kepada pelaksana kebijakan yang menunjukkan disposisi positif. Program pelatihan dan pembinaan bisa dilaksanakan guna meningkatkan pemahaman dan sikap yang mendukung implementasi kebijakan. *Keempat*, walaupun struktur birokrasi telah terorganisir dengan baik, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap SOP yang ada. Selain itu, memperkuat kapasitas sumber daya manusia di tingkat birokrasi dapat menjadi investasi jangka panjang dalam memelihara keberlanjutan program.

Saran yang dilakukan dari penelitian ini yaitu: *Pertama*, walaupun komunikasi yang dilakukan sudah berhasil, penting untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas komunikasi dengan masyarakat. *Kedua*, selalu melaksanakan evaluasi tentang penggunaan sumber daya guna memastikan efisiensi dan efektivitasnya. *Ketiga*, meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat supaya bisa memperkuat perubahan perilaku positif yang berkelanjutan dan memastikan keberlanjutan program atau kebijakan penanggulangan stunting. *Keempat*, kerjasama lintas sektoral dengan pihak terkait perlu ditingkatkan guna memperkuat upaya pengimplementasian kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting.

## 2. Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi kebijakan SDGs dalam Penanggulangan Stunting di Kabupaten Kudus

Berdasarkan hasil penelitian wawancara mendalam yang peneliti lakukan dengan informan bahwa adanya berbagai faktor pendorong untuk mengimplementasikan kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting, yakni tekad untuk menurunkan prevalensi stunting. Ini tidak hanya mencerminkan keinginan kuat untuk mengatasi masalah stunting itu sendiri, tetapi juga sebagai respon terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Dorongan lain guna mengimplementasikan kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting juga untuk mengentaskan kemiskinan, kelaparan, dan meningkatkan pendidikan. Partisipasi kader dan dukungan dari berbagai pihak juga menjadi faktor pendorong. Seluruh elemen tersebut bersinergi dalam menciptakan upaya penanggulangan stunting yang efektif dan berkelanjutan, mencerminkan kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak dalam meningkatkan kesehatan anak-anak.

Adapun faktor penghambat untuk mengimplementasikan kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Kudus yakni, kurangnya kerjasama lintas sektoral, di mana penanggulangan stunting tidak hanya tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga membutuhkan kontribusi dari sektor lainnya, baik pemerintah maupun swasta. Pentingnya konvergensi, kolaborasi, dan sinergi diharapkan dapat mengatasi hambatan tersebut. Selanjutnya, merubah perilaku orang tua terkait pengelolaan ekonomi keluarga dan pola asuh juga menjadi faktor penghambat. Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah di kalangan orang tua dapat menjadi kendala serius dalam upaya penanggulangan stunting, mengingat pemahaman yang kurang dapat mempengaruhi keputusan terkait pola asuh dan pemenuhan nutrisi anak. Selain itu, kesibukan ibu yang bekerja menjadi kendala dalam memberikan perhatian dan pemenuhan gizi yang memadai kepada anak-anak. Peneliti juga menemukan bahwa persepsi masyarakat yang meremehkan masalah stunting menjadi hambatan. Adanya ketidakpahaman dan kurangnya kesadaran terkait stunting dapat menghambat langkah-langkah penanggulangan yang diperlukan.

Berdasarkan hasil analisis, bisa diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Kudus didorong oleh tekad dan komitmen

dalam menurunkan prevalensi stunting, untuk mengentaskan kemiskinan, kelaparan, meningkatkan pendidikan, partisipasi kader, dan dukungan dari berbagai pihak. Sedangkan faktor penghambatnya mencakup kerjasama lintas sektoral kurang maksimal, kendala dalam merubah pola asuh orang tua, kesibukan ibu yang bekerja khususnya di pabrik, tingkat pendidikan dan rendahnya wawasan orang tua, kurangnya kesadaran atau ketidak pahaman tentang dampak stunting. Hal ini dikuatkan dengan hasil penelitian dari Farhan Damara yang menyatakan bahwa faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Sampang yaitu adanya komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak, adanya dukungan anggaran yang diberikan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah banyaknya pernikahan dini dan masyarakat pendatang yang kurang taat administrasi.<sup>77</sup> Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Norsanti yang menyatakan bahwa faktor pendukung program percepatan penurunan stunting adalah kerjasama yang baik antara petugas gizi dari UPT Puskesmas Batumandi, bidan desa, kader Posyandu dan kader PMT. Adapun yang menjadi faktor penghambatnya yakni anggaran yang masih kurang, pendidikan orang tua, ekonomi keluarga balita stunting serta sosialisasi tentang pola asuh anak yang masih kurang.<sup>78</sup> Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Triana Wahyuningsih dan Sedarmayanti yang mengatakan bahwa faktor pendukung Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bangkalan adalah koordinasi yang saling bersinergi, mengevaluasi, memonitoring semua kendala dan hambatan yang dialami oleh setiap bidang-bidang dibawahnya untuk melaksanakan pencegahan sesuai kasus serta seluruh pembaruan yang dilaksanakan dalam upaya percepatan penurunan stunting. Sedangkan faktor penghambatnya yakni terdapat kemiskinan di berbagai daerah atau desa, dukungan hanya dari pemerintah pusat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sumber daya manusia yang terbatas, minat catin di desa untuk memeriksakan kesehatannya sebelum menikah masih rendah, rendahnya

---

<sup>77</sup> Farhan Damara, "Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur," 2022, 1–11.

<sup>78</sup> Norsanti, "Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan (Studi Kasus Pada Desa Mampari Dan Desa Banua Hanyar)," *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan* 3, no. 1 (2021): 10–21, <https://doi.org/10.20527/jpp.v3i1.3825>.

dukungan dana dari Pemerintah Daerah, sarana dan prasarana yang masih terbatas, kinerja pelayanan Perangkat Daerah kurang optimal.<sup>79</sup>

Kesimpulan dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting didorong oleh tekad dan komitmen untuk menurunkan prevalensi stunting, partisipasi kader, dukungan pemerintah desa, kesadaran akan dampak negatif stunting, komitmen bersama masyarakat, dukungan dari pemerintah daerah, lembaga kesehatan, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam posyandu. Sedangkan faktor penghambatnya mencakup kerjasama lintas sektoral kurang maksimal, kendala dalam merubah pola asuh orang tua, kesibukan ibu yang bekerja khususnya di pabrik, rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua, kurangnya kesadaran atau ketidak pahaman tentang dampak stunting. Temuan ini didukung oleh beberapa penelitian yang menyatakan bahwa faktor-faktor pendukung dalam implementasi kebijakan penurunan stunting meliputi komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak, dukungan anggaran, kerjasama yang baik antara petugas gizi, bidan desa, kader Posyandu, dan kader PMT, serta koordinasi yang saling bersinergi, evaluasi, dan monitoring. Sementara itu, faktor-faktor penghambatnya meliputi pernikahan dini, masyarakat pendatang yang kurang taat administrasi, anggaran yang masih kurang, pendidikan orang tua, ekonomi keluarga balita stunting, penyuluhan atau sosialisasi tentang pola asuh anak yang masih kurang, kemiskinan, dukungan yang berasal dari pemerintah pusat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sumber daya manusia yang terbatas, rendahnya minat cek kesehatan sebelum menikah, rendahnya dukungan dana dari Pemerintah Daerah, serta sarana dan prasarana yang masih terbatas.

Dari rumusan masalah mengenai analisis faktor pendorong dan penghambat untuk mengimplementasikan kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting, maka implikasi faktor pendorongnya adalah menciptakan keberhasilan program penanggulangan stunting, meningkatkan kesehatan dan gizi anak, dan menurunkan angka stunting. Adapun implikasi dari faktor penghambatnya adalah implementasi kebijakan SDGs dalam

---

<sup>79</sup> Triana Wahyuningsih and Sedarmayanti, "Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Bangkalan," *Jurnal Mahasiswa Soetomo Magister Ilmu Administrasi*, 2023, 253–62.

penanggulangan stunting dapat terhambat dan kesulitan dalam mencapai target penurunan prevalensi stunting.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah: *Pertama*, meningkatkan kerjasama lintas sektoral. *Kedua*, meningkatkan pengetahuan orang tua terkait pola asuh maupun pemenuhan nutrisi anak. *Ketiga*, dukungan dari orang tua untuk memperhatikan pemenuhan gizi yang memadai kepada anak disela kesibukannya dalam bekerja. *Keempat*, sosialisasi ataupun edukasi kepada masyarakat yang masih memiliki kesadaran yang rendah terkait dampak stunting. Saran yang dilakukan dari penelitian ini yaitu: *Pertama*, mendorong pemerintah untuk mengembangkan program kerjasama lintas sektoral yang melibatkan berbagai instansi terkait. *Kedua*, mengadakan program penyuluhan dan edukasi kepada orang tua mengenai pola asuh yang sehat dan pemenuhan nutrisi yang baik untuk anak-anak. Pengetahuan yang lebih baik akan membantu orang tua dalam memberikan perawatan dan pemenuhan gizi yang optimal. *Ketiga*, mendorong dukungan aktif dari orang tua dalam memberikan perhatian dan pemenuhan gizi yang memadai bagi anak. *Keempat*, melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat yang berfokus pada peningkatan kesadaran akan dampak negatif stunting.

### **3. Analisis Strategi Pemangku Kepentingan untuk Mengimplementasikan Kebijakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam Penanggulangan Stunting di Kabupaten Kudus**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait, strategi penanggulangan stunting di Kabupaten Kudus yang dilakukan melalui advokasi dan pendekatan kepada pejabat tinggi, terutama Bupati, sebagai langkah awal dalam memastikan dukungan penuh dari pemerintah daerah. Pentingnya melibatkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat secara keseluruhan menunjukkan komitmen bersama untuk mengatasi stunting sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas Dinas Kesehatan semata.

Selanjutnya adalah strategi lintas sektoral dan keterlibatan pihak dalam mengatasi hambatan implementasi penanggulangan stunting. Kerja sama erat antara beberapa *stakeholder* menjadi kunci untuk menangani tantangan pengimplementasian kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting dari berbagai sisi.

Pentingnya penyuluhan sebagai strategi untuk mengatasi hambatan implementasi kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting tercermin dari upaya memberikan pemahaman mendalam kepada orang tua. Penyuluhan tidak hanya sebagai informasi, tetapi juga sebagai langkah awal yang diikuti dengan kerja sama dengan pihak terkait. Pemahaman orang tua tentang peran Posyandu diharapkan bisa meningkatkan partisipasi, mendukung pemantauan kesehatan anak, dan hingga akhirnya membantu mengatasi masalah stunting.

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi untuk mengimplementasikan kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Kudus dilakukan dengan advokasi, melakukan pendekatan dengan pejabat yang lebih tinggi, kerjasama lintas sektoral, dan penyuluhan. Hal ini menggambarkan tekad untuk mencapai solusi dan mendapatkan hasil optimal dalam menanggulangi stunting, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fajri Maulana, Mala Sondang Silitonga, dan Asropi yang mengemukakan bahwa salah satu upaya untuk mengatasi kendala atau hambatan selama implementasi kebijakan adalah dengan melibatkan berbagai *stakeholder* di luar ruang lingkup pemerintahan untuk bersama-sama berkontribusi sesuai dengan bidang kerjanya. Harapannya program percepatan penurunan stunting di desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun dapat menjadi agenda bersama antar pihak di semua lapisan sehingga desa bebas stunting dapat terwujud dan dilaksanakan dengan efektif dan efisien.<sup>80</sup> Hal ini juga diperkuat penelitian yang dilakukan oleh Ratnaningsih Damayanti, dkk mengatakan bahwa untuk menanggulangi kasus stunting dilakukan beberapa hal. Pertama, koordinasi antar sektoral dalam upaya penanggulangan stunting di tingkat pemerintah kabupaten atau kota lebih dikuatkan. Kedua, memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah dengan pemerintah desa untuk menumbuhkan komitmen bersama, khususnya dalam pendanaan guna pananggulangan stunting.<sup>81</sup> Selanjutnya penelitian yang

---

<sup>80</sup> Fajri Maulana, Mala Sondang Silitonga, and Asropi, "Intervensi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Dalam Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Di Desa," *Journal Publichuo* 6, no. 4 (2023): 1393–1410.

<sup>81</sup> Ratnaningsih Damayanti et al., "Peleburan Ego Sektoral: Strategi Menurunkan Stunting Di Trenggalek," *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik* 6, no. 2 (2021): 197–216, <https://doi.org/10.25077/jakp.6.2.197-216.2021>.

dilakukan oleh Zainul Rahman, dkk mengemukakan bahwa upaya pemerintah desa dalam mengatasi stunting diawali dengan program tertib Posyandu. Selanjutnya pemerintahan desa juga menggagas untuk membuat pelatihan kader-kader yang nantinya membantu bidan desa untuk mencegah stunting yang ada di Desa Donowarih, serta memberikan makanan gizi tambahan untuk ibu hamil dan menyusui serta bayinya.<sup>82</sup>

Kesimpulan dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi untuk mengimplementasikan kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Kudus dilakukan dengan advokasi, melakukan pendekatan dengan pejabat yang lebih tinggi, kolaborasi lintas sektoral, dan penyuluhan. Temuan ini didukung oleh beberapa penelitian yang menegaskan bahwa untuk mengatasi kendala atau hambatan selama implementasi kebijakan penanggulangan stunting, diperlukan keterlibatan berbagai *stakeholder* di luar ruang lingkup pemerintahan. Selain itu, upaya untuk menanggulangi kasus stunting juga melibatkan langkah-langkah seperti memperkuat koordinasi antar sektoral di tingkat pemerintah kabupaten/kota, antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa, serta upaya pencegahan stunting melalui program tertib Posyandu, pelatihan kader-kader, dan pemberian asupan gizi tambahan bagi ibu hamil, menyusui, dan bayi.

Dari rumusan mengenai analisis strategi pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan kebijakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Kudus maka implikasinya adalah peningkatan dukungan dan komitmen pemerintah, pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal melalui kerjasama lintas sektoral, peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap stunting. Rekomendasi dari penelitian ini yaitu: *Pertama*, meningkatkan pendekatan dengan pejabat tinggi di tingkat pemerintahan sehingga implementasi kebijakan dapat mendapatkan dukungan yang lebih besar. *Kedua*, mendorong dan memperkuat kerjasama lintas sektoral antara berbagai instansi terkait. *Ketiga*, memperluas dan meningkatkan program penyuluhan kepada masyarakat, terutama kepada orang tua mengenai pentingnya pola asuh yang baik dan pemenuhan gizi anak. Saran yang

---

<sup>82</sup> Zainul Rahman et al., "Analisis Kebijakan Pencegahan Stunting Dan Relevansi Penerapan Di Masyarakat (Studi Kasus: Desa Donowarih)," *Karta Rahardja* 2, no. 1 (2021): 27–33, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.



diberikan dari penelitian ini yakni: *Pertama*, meningkatkan koordinasi lintas sektoral dikarenakan hal tersebut bisa memastikan informasi yang lancar dan kolaborasi yang efektif antar lembaga terkait. *Kedua*, menyusun program penyuluhan yang lebih terfokus dan relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. *Ketiga*, meningkatkan upaya advokasi ke berbagai pihak terkait, termasuk pejabat yang lebih tinggi untuk memastikan dukungan yang lebih kuat dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan SDGs dalam penanggulangan stunting.

#### 4. Analisis Dampak Stunting Bagi Perekonomian di Kabupaten Kudus

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti dengan informan menunjukkan bahwa dampak dari adanya stunting mempengaruhi dana desa yang harus dikeluarkan lebih banyak untuk menanggulangi kasus stunting di Desa Gribig, selain itu stunting juga akan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi kedepannya serta pengeluaran desa yang meningkat.

Analisis dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa masalah stunting secara langsung berdampak pada perekonomian suatu daerah. Hal tersebut tercermin dari pernyataan Ibu Sunarsih dan Bapak Agung Triyatno, yang menyoroti tentang pengeluaran desa lebih banyak, khususnya dalam menanggulangi masalah stunting. Penyediaan dana yang lebih besar untuk mengatasi stunting menunjukkan bahwa hal ini dianggap sebagai prioritas yang penting bagi pemerintah. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Darmaida Sari, Arie Dwi Ningsih, dan Azzahra yang mengungkapkan bahwa stunting pada anak sangat berdampak pada masa depan mereka dimana anak stunting akan memiliki kesulitan dan gagal fokus dalam belajar. Hal tersebut menyebabkan kualitas pendidikan si anak stunting menjadi rendah dan tidak mampu bersaing di dunia kerja dan akan mempengaruhi pendapatan mereka sehingga mengakibatkan ekonomi menjadi rendah. Himbauan untuk datang ke Posyandu harus dilakukan karena terbukti bahwa Posyandu sangat membantu para ibu agar mengetahui tumbuh kembang anak.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Darmaida Sari et al., "Pencegahan Stunting Pada Anak Usia Dini Serta Dampaknya Pada Faktor Pendidikan Dan Ekonomi," *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Nusantara (JPKMN)* 4, no. 3 (2023): 2679–85.

Penelitian yang dilakukan oleh Rully Angraeni Safitri, Dewi Puspitasari, dan Fajar Ramadhan Saputra mengatakan bahwa anak yang pertumbuhan fisiknya terganggu akibat kurangnya pemenuhan nutrisi akan berdampak pada perkembangan otak, fungsi kognitifnya, dan sistem kekebalan tubuhnya akan terpengaruh. Ekonomi juga menjadi terdampak akibat stunting, seperti produktivitas, kesehatan, pendidikan, dan biaya perawatan kesehatan.<sup>84</sup> Selanjutnya, diperkuat penelitian yang dilakukan oleh Karina Wardani dan Brigitte Sarah Renyoet yang mengatakan bahwa wasting balita pada tahun 2013 diperkirakan menyebabkan kerugian ekonomi bagi Indonesia sebesar Rp. 1.042 miliar (2%)-Rp. 4.687 miliar (9%), kemudian stunting sebesar Rp. 3.057 miliar (2%)-Rp. 13.758 miliar (9%), serta *underweight* sebesar Rp. 3.054 miliar (2%)-Rp. 13.746 miliar (9%). *Undernutrition* dapat menurunkan angka produktivitas manusia dan meningkatkan prevalensi.<sup>85</sup>

Menurut hasil analisis maka bisa disimpulkan bahwa masalah stunting berdampak pada pertumbuhan ekonomi kedepannya dan pengeluaran yang lebih banyak untuk menanggulangi masalah stunting. Temuan ini didukung oleh beberapa penelitian yang menegaskan bahwa stunting pada anak memiliki dampak serius pada masa depan mereka, termasuk kesulitan belajar dan rendahnya kualitas pendidikan. Kurangnya pemenuhan nutrisi pada anak juga dapat berdampak pada perekonomian, seperti tidak mampu bersaing di dunia kerja yang akan mempengaruhi pendapatan mereka sehingga mengakibatkan ekonomi menjadi rendah, mengurangi produktivitas manusia dan meningkatkan biaya perawatan kesehatan.

Dari rumusan mengenai dampak stunting bagi perekonomian di Kabupaten Kudus maka implikasinya adalah terjadinya penurunan produktivitas tenaga kerja dan meningkatnya biaya perawatan kesehatan, sehingga hal ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kudus. Rekomendasi dari penelitian ini yaitu: *Pertama*, memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan maternal dan anak di Kabupaten

---

<sup>84</sup> Rully Angraeni Safitri, Dewi Puspitasari, and Fajar Ramadhan Saputra, "Dampak Lingkungan Stunting Dan Perekonomian," 133–39.

<sup>85</sup> Karina Wardani and Brigitte Sarah Renyoet, "Studi Literatur: Estimasi Potensi Kerugian Ekonomi Akibat Undernutrition Di Indonesia," *Jurnal Gizi Dan Kesehatan* 14, no. 1 (2022): 114–27, <https://doi.org/10.35473/jgk.v14i1.268>.

Kudus yang dilengkapi dengan fasilitas dan tenaga medis yang kompeten. *Kedua*, melakukan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang pentingnya gizi dan perawatan kesehatan anak, serta menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting. Adapun saran yang diberikan dari penelitian ini yakni: *Pertama*, meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualifikasi dalam bidang kesehatan anak, serta memastikan ketersediaan dan aksesibilitas obat-obatan dan suplemen gizi yang diperlukan. *Kedua*, melakukan pemantauan dan evaluasi secara teratur terhadap implementasi program-program pencegahan stunting, serta mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya, guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan program tersebut.

